

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PALCOMTECH**

**EVALUASI BELANJA OPERASIONAL PADA SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014-2017**



Diajukan Oleh:

KURNIATI

041160023

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan dan
Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul **“Evaluasi Belanja Operasional Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2017”**. Laporan PKL ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (D3) Program Studi Akuntansi pada Politeknik Palcomtech.

Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena-Nya penulis telah dimudahkan dalam menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
2. Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Palcomtech.
3. Bapak D Tri Octafian, S.Kom., M.Kom. selaku Pembantu Direktur 1.
4. Kepala Program Studi Akuntansi yaitu Ibu Rizki Fitri Amalia, SE., M.Si., Ak.
5. Bapak Jovan Febriantoko, SE. M. Acc. Ak. CA selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama penulisan laporan.

6. Orangtua dan saudara saya yang tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk saya, serta teman-teman seangkatan yang telah membantu dalam proses pembuatan laporan.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan di instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah menerima dan membimbing selama kegiatan kerja praktek berlangsung khususnya bidang pajak.

Akhirnya semoga penulisan ini bermanfaat untuk instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin, rekan-rekan mahasiswa untuk penelitian selanjutnya dan pembaca pada umumnya.

Palembang, 27 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Tujuan dan Manfaat	4
1.4.1. Tujuan Penelitian	4
1.4.2. Manfaat Penelitian	4
1.4.2.1. Bagi Mahasiswa	4
1.4.2.2. Bagi Pemerintah DPRD	5
1.4.2.3. Bagi Akademik	5
1.5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL	5
1.5.1. Tempat PKL	5
1.5.2. Waktu Pelaksanaan PKL	5
1.6. Teknik Pengumpulan Data	5
1.6.1. Metode <i>Observasi</i>	6
1.6.2. Metode Wawancara	6
1.6.3. Metode Dokumentasi	6
1.7. Jenis Data Yang Dikumpulkan	7

1.7.1. Data Primer.....	7
1.7.2. Data Skunder.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	8
2.1.2. Pengertian Laporan realisasi Anggaran	8
2.1.3. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	9
2.1.4. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	9
2.1.5. Belanja Langsung	10
2.1.6. Belanja Tidak Langsung	11
2.1.7. Belanja Operasional.....	14
2.1.8. Rasio Ekonomi,Efisiensi,Efektivitas.....	14
2.1.9. Rasio Varians Belanja	15
2.2. Gambaran Umum Lokasi PKL.....	15
2.2.1. Sejarah Singkat Organisasi	15
2.2.2. Visi Misi DPRD Kabupaten Banyuasin	17
2.3. Struktur Organisasi	18
2.3.1. Struktur Organisasi DPRD.....	18
2.3.2. Uraian Tugas Struktur Organisasi	18
2.2.3. Uraian Kegiatan	20
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Data Penelitian	23
3.1.1. Data Anggaran Sekretariat DPRD	23
3.2. Hasil Penelitian	26
3.2.1. Perhitungan Rasio Ekonomi,Efisiensi,Efektivitas.....	26
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan	38
4.2. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA xii

HALAMAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi.....	18
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Form Topik dan Judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Surat Balasan dari Perusahaan (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. Form Konsultasi (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. Form Nilai dari Perusahaan (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. Form Absensi dari Perusahaan (*Fotocopy*)
7. Lampiran 7. Form Kegiatan Harian PKL (*Fotocopy*)
8. Lampiran 8. Form Revisi (Asli)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi anggaran belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu entitas dan pelaporan.

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari LRA, LO, APBD, CALK, dan neraca.

Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran

menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa, analisis belanja dan analisis pembiayaan (Mahmudi 2010 : 135)

Berikut Laporan Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

Tabel 1.1

Data Anggaran dan Realisasi Belanja

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2017

Tahun CALK	Anggaran	Realisasi	%
2014	Rp53.622.579.853,00	Rp46.280.520.104,00	86
2015	Rp47.751.290.897,00	Rp41.953.261.031,00	88
2016	Rp66.004.991.925,00	Rp54.122.802.964,00	82
2017	Rp96.810.533.127,00	Rp94.106.756.332,00	97

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin, 2018

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa data realisasi belanja operasional Sekretariat DPRD Tahun 2014-2017 yang mengalami persentase tertinggi tahun 2017 yaitu sebesar 97,2%.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat evaluasi kinerja laporan keuangan berupa, evaluasi belanja dan evaluasi pembiayaan, maka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi. Anggaran evaluasi terhadap belanja ini pun mutlak harus

dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan kedepannya.

Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Dalam evaluasi kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan belanja operasional dan belanja modal dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat satu karya ilmiah yang berbentuk tugas dalam menyelesaikan (PKL) dengan judul **“Evaluasi Belanja Operasional Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin 2014-2017.”**

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, agar penelitian lebih terarah maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah ‘’Bagaimana kinerja laporan keuangan belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin pada tahun 2014-2017?

1.3. Ruang Lingkup PKL

Penulis akan membahas tentang kinerja keuangan tahun 2017 selama praktik kerja lapangan (PKL) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian PKL

1.4.1. Tujuan Penelitian PKL

Penelitian adalah sarana yang fundamental untuk memenuhi secara ilmiah, untuk itu penulis mempunyai tujuan yaitu Mengevaluasi Kinerja Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

1.4.2. Manfaat Penelitian PKL

Manfaat selama penulis melakukan praktik kerja lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Mendapatkan pengalaman dan meningkatkan mencari ilmu untuk wawasan mengenai laporan keuangan, dengan adanya praktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat.

1.4.2.2. Manfaat Bagi Pemerintah DPRD

Dengan adanya mahasiswa praktek kerja lapangan (PKL), dapat membantu dan mempermudah staff DPRD Kabupaten Banyuasin.

1.4.2.3. Manfaat Bagi Akademik

Untuk memberikan manfaat dalam menambah pembendaharaan diperpustakaan dan memberikan masukan bagaimana sebenarnya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banyuasin.

1.5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL

1.5.1. Tempat PKL

Tempat yang dilaksanakan penulis melakukan PKL di komplek Perkantoran Sekojo No.02, Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

1.5.2. Waktu Pelaksanaan PKL

Penulis melaksanakan PKL tepat pada tanggal 01 September 2018 sampai ber akhirnya 30 September 2018. Setiap hari senin-kamis dari pukul 08.00-16.00 dan hari sabtu, minggu libur.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan penyusunan laporan praktek kerja lapangan menurut Sunyoto (2013 : 22) adalah :

1.6.1. Observasi

Observasi suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pada pengamatan ini peneliti secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti kelokasi yaitu di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

1.6.2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis telah melakukan wawancara secara langsung ke staff bagian umum dan kepegawaian kepada Bapak Tarmizi, S.Sos,MM dan kabag keuangan kepada Bapak Muhammad, S.Sos., M.Si.

1.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses untuk menghasilkan dokumen-dokumen yang berfungsi sebagai informasi dan pendukung medium pendukungnya. Pada

laporan ini berupa data anggaran dan realisasi belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

1.7 Jenis- Jenis Data yang Dikumpulkan

Adapun jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder menurut Sekaran (2011) adalah :

1.7.1 Data primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin melalui wawancara secara langsung bagian keuangan dan anggaran yaitu Bapak Muhammad, S,Sos.,M.Si dan bagian perencanaan penganggaran yaitu Bapak Chairil, SI.Kom.

1.7.2 Data skunder

Data skunder yaitu, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, sumber data yang diperoleh saat PKL adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2014-2017 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2010 menyatakan laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.1.2 Pengertian Realisasi Anggaran

Pengertian realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar diperiode-periode berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi (Munandar : 2011).

Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan

informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2010, tujuan laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka dalam memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan. Adapun tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2010, manfaat laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan

dalam mengevaluasi kepuasan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2.1.5. Belanja Langsung

Berdasarkan pada belanja langsung terdapat beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian atau pengadaan barang atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi sarana sewa mobilitas sewa perlengkapan dan peralatan kantor.

3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian atau pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan atau belanja barang dan jasa.

2.1.6. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan belanja tidak langsung terdapat beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Belanja bunga merupakan pengeluaran pemerintahan untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
2. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
4. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
5. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Secara umum belanja APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu :

- 1) Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum ada tiga

jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan.

- 2) Belanja Operasi , Pemeliharaan adalah belanja semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja operasi ini dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, dan belanja pemeliharaan.
- 3) Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi dua yaitu belanja publik dan belanja aparatur.
- 4) Belanja Transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah pada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Belanja transfer dibagi menjadi tiga yaitu angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.
- 5) Belanja Lain-lain atau Tak Terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai

kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

2.1.7. Belanja Operasional

Value For Money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

2.1.8. Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas.

Menurut Mahmudi (2010 : 68) perhitungan value for money tiga cara yaitu Ekonomi, Efisiensi, dan Efektif.

1. $Ekonomi = \frac{Anggaran}{Realisasi} \times 100\%$
2. $Efisiensi = \frac{Realisasi Anggaran}{Total Belanja} \times 100\%$
3. $Efektivitas = \frac{Realisasi}{Anggaran} \times 100\%$

2.1.9. Rasio Varians Belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. *analisis varians* merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam nilai nominalnya atau persentasinya.

2.2. Gambaran Umum Lokasi PKL

2.2.1 Sejarah Singkat Organisasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang semakin hari semakin kompleks.

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004, unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta mengangkat daerah

otonomi yang lain (sebagai badan eksekutif daerah), dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai cermin rakyat, diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan haknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam nebgantisipasi dan memperjuangkan serta menyerap informasi sesuai tuntutan yang berkembang.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Insitusi Pemerintah, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin membuat suatu laporan kinerja instansi pemerintah sebagai pelaporan dan ukuran atas efisiensi dan efektivitas dan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang yang semakin meningkat. Oleh karena itu, keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Sesuai dengan peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin adalah membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai badan legislatif daerah maupun sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2.2.2 Visi dan Misi DPRD Kabupaten Banyuasin

Visi DPRD Kabupaten Banyuasin

Banyuasin sebagai kawasan strategis terpadu yang berdaya saing global, mandiri, dan berkelanjutan.

Misi DPRD Kabupaten Banyuasin

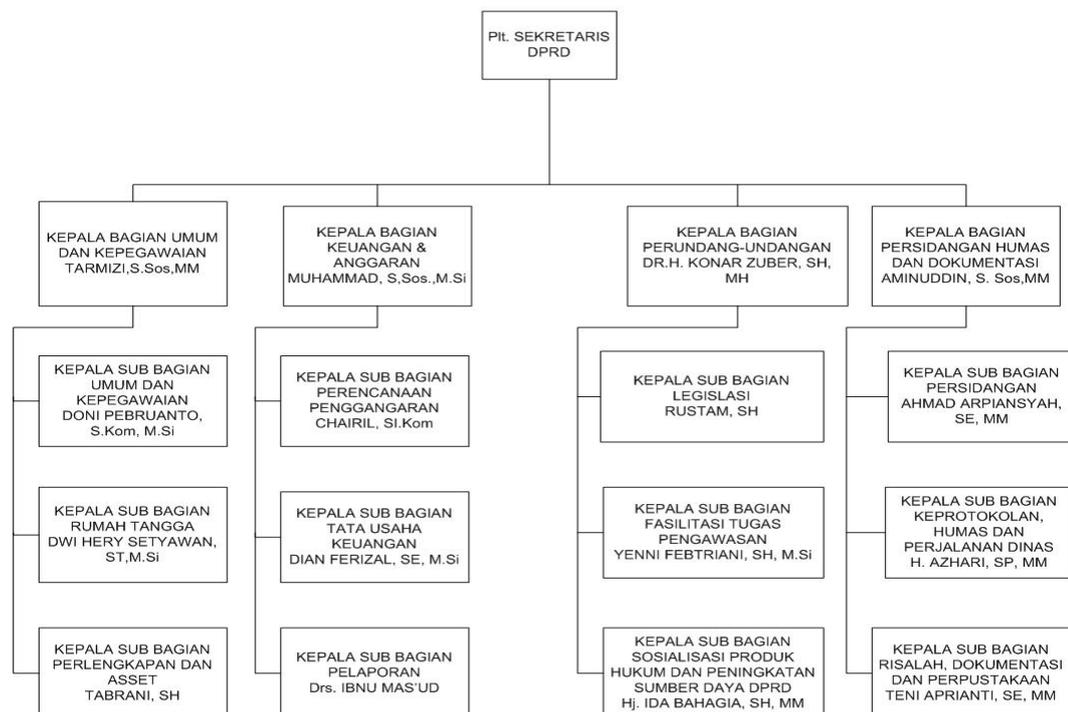
Masyarakat Kabupaten Banyuasin yang sejahtera, berdaya saing dan mandiri.

- a) Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
- b) Menciptakan pemerintah dengan tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel.
- c) Meningkatkan peran kabupaten banyuasin dalam pembangunan regional, nasional dan internasional.
- d) Memperkuat kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan untuk menciptakan masyarakat kabupaten banyuasin yang sejahtera.

2.3. Organisasi Struktur

Adapun struktur organisasi dari DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

2.3.1 Struktur Organisasi DPRD



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

2.3.2 Uraian Tugas Struktur Organisasi

Penjabaran uraian tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, tata usaha umum, usaha rumah tangga dan perlengkapan,

urusan rumah dinas, gedung kantor DPRD, salah satu fungsinya bekoordinasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tersebut.

Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata urusan pimpinan, tata usaha umum dan kepegawaian.

2. Bagian Keuangan dan Anggaran

Bagian keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam rangka melaksanakan urusan program dan anggaran, pembendaharaan, pembukuan serta pertanggung jawaban keuangan sekretaris DPRD serta membina, mengawasi, mengendalikan dan mengelola administrasi keuangan sekretaris DPRD kabupaten banyuasin. Fungsi adanya bagian keuangan adalah mengumpulkan bahan penyusunan, serta mengelola administrasi keuangan.

Bagian perencanaan anggaran mempunyai tugas yaitu mengumpulkan bahan penyusunan, menyiapkan rencana anggaran, dan mengikuti rapat-rapat anggaran yang diselenggarakan.

3. Bagian Perundang-undangan

Bagian perundang-undangan mempunyai tugas membuat rancangan peraturan daerah usul Inisiatif DPRD, mempersiapkan surat keputusan DPRD, menghimpun dan

memelihara dokumentasi produk DPRD dan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan keputusan DPRD kabupaten banyuasin. Fungsi dari bagian perundang-undangan adalah mempersiapkan rancangan peraturan daerah usul inisiatif surat keputusan, serta persetujuan bersama DPRD.

4. Bagian Persidangan Humas dan Dokumentasi

Bagian Persidangan dan Humas mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat atau sidang DPRD kabupaten banyuasin serta memfasilitasi kegiatan dan kehumasan dan kepratokolan DPRD kabupaten banyuasin.

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memfasilitasi setiap kegiatan kehumasan dan kepratokolan DPRD, mempublikasikan atau memberi informasi mengenai kegiatan DPRD kepala masyarakat, memfasilitasi pertemuan pimpinan DPRD, alat perlengkapan DPRD, dan memfasilitasi perjalanan dinas.

2.4. Uraian Kegiatan

Penulis melakukan pada saat (PKL) di Sekretariat DPRD kabupaten banyuasin mendapatkan banyak pengalaman dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Penulis ditempatkan dibagian tata usaha dan dari berbagai aktivitas yang beragam tersebut terdapat jenis kegiatan

yang bersifat rutin yang dilakukan penulis selama melakukan PKL dan ada pula kegiatan yang bersifat tidak rutin. Selama PKL di Sekretariat DPRD kabupaten banyuasin yang berada di jalan Komplek Perkantoran Sekojo No. 02 Pangkalan Balai. Kegiatan yang dilakukan seperti membantu membuat laporan,, membantu membuat menyiapkan kursi siding pari purna, membantu fotocopy berkas, membantu mengisi data, membantu menginput data, membantu mengarsip dokumen dan membantu mengarsip kas keluar setiap harinya.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Data Penelitian

3.1.1. Data Anggaran Sekretariat DPRD

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang berasal dari laporan realisasi anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2017.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Sekretariat
DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2015

(Rp. 000)

Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Anggaran 2015	Realisasi 2015
Belanja Operasi	52.608.162	36.803.374	43.996.201	39.464.815
Belanja Pegawai	5.679.341	4.907.767	5.923.748	5.603.267
Belanja Brang	46.928.821	31.895.606	38.072.452	33.861.547
Belanja Modal	1.014.417	961.616	3.755.089	2.488.445
Belanja Peralatan dan Mesin	897.417	876.515	2.565.089	1.617.006
Belanja Bangunan dan Gedung	92.000	85.101	100.000	92.625
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	25.000	-	30.000	-
Belanja Asset Tetap Lainnya	-	-	1.060.000	778.813
(Surplus/defisit)	53.622.579	37.764.990	47.751.290	41.953.261

Sumber: Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD, 2014-2015

Pada Kinerja Keuangan Belanja Daerah Tahun 2015-2016 dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin
Tahun 2016-2017

(Rp.000)

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Anggaran 2017	Realisasi 2017
Belanja Operasi	52.608.162	36.803.374	43.996.201	39.464.815
Belanja Pegawai	5.679.341	4.907.767	5.923.748	5.603.267
Belanja Barang	46.928.821	31.895.606	38.072.452	33.861.547
Belanja Modal	1.014.417	961.616	3.755.089	2.488.445
Belanja Peralatan dan Mesin	897.417	876.515	2.565.089	1.617.006
Belanja Bangunan dan Gedung	92.000	85.101	100.000	92.625
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	25.000	-	30.000	-
Belanja Asset Tetap Lainnya	-	-	1.060.000	778.813
(Surplus/defisit)	53.622.579	37.764.990	47.751.290	41.953.261

Sumber: Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD, 2016-2017

Adapun Kinerja Keuangan Belanja Daerah Tahun 2016-2017 dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan.

Tabel 3.3
Analisis Varians Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014-2017

(Rp.000)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase Varians Belanja	Kriteria
2014	53.622.579	37.764.990	15.857.589	70%	Kurang baik
2015	47.751.290	41.953.261	5.798.029	88%	Baik
2016	66.004.991	54.122.802	11.882.188	82%	Baik
2017	96.106.756	94.106.756	2.000.000	98%	Baik
Total	263.485.618	227.947.810	35.537.808	86%	Baik

Sumber: Diolah dari laporan Belanja Sekretariat DPRD, 2018

Jika < 80% = Kurang Baik

Jika > 80% = Baik

Berdasarkan tabel 3.3 Analisis Varians Belanja daerah pada tahun 2014, karena persentasenya 70% dikatakan kurang efektif karena pelaksanaan anggaran kurang baik.

Jika Analisis Varians Belanja Daerah terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Belanja dinilai baik (Mahmudi, 2010).

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Perhitungan Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

Berikut ini rumus perhitungan Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas belanja yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

$$1. \text{ Ekonomi} = \frac{\text{Anggaran}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Tabel 3.4

Nilai Interpretasi Ekonomi

Kriteria Ekonomi	Presentasi Ekonomi
Ekonomi	>100%
Cukup Ekonomi	85% sampai 100%
Kurang Ekonomi	65% hingga 84%
Tidak Ekonomi	<65%

Sumber: Mahmudi, 2011

Berikut ini adalah cara perhitungan kinerja ekonomi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2017.

Tabel 3.5

Nilai Kinerja Ekonomi Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Akun	Ekonomi	Cukup Ekonomi	Kurang Ekonomi	Tidak Ekonomi	Presentasi Ekonomi
2014	6	6	0	0	0	72,176%
2015	7	7	0	0	0	88,321%
2016	7	7	0	0	0	150,164%
2017	7	6	0	0	1	63,078%

Sumber: Data diolah, 2018

Dari Tabel diatas jumlah akun pada tahun 2014 ada 6 akun dan tahun 2015-2017 ada 7 akun pada jumlah akun. maka pada ekonomi ada 7 akun, presentasi pada tahun 2014 yaitu sebesar 72,176%. Ditahun 2015 ekonominya ada 7 akun dan presentasinya tahun 2015 yaitu sebesar 88,321%. Adapun ditahun 2016 ekonominya ada 7 akun dan presentasinya yaitu sebesar 150,164%. Sedangkan ditahun 2017 yang termasuk ekonominya ada 6 akun dan tidak ada ekonominya ada 1 akun, maka presentasi tahun 2017 yaitu sebesar 63,078%.

$$2. \text{ Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.6

Nilai Interpretasi Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Presentasi Efisiensi
Sangat Efisiensi	<90%
Efisiensi	90% hingga 99%
Cukup Efisiensi	100%
Tidak Efisiensi	>100%

Sumber: Mahmudi, 2011

Berikut ini adalah cara perhitungan kinerja efisiensi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2017.

Tabel 3.7
Nilai Kinerja Efisiensi Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Akun	Sangat Efisiensi	Efisiensi	Cukup Efisiensi	Tidak Efisiensi	Presentasi Efisiensi
2014	6	5	1	0	0	19,997%
2015	7	6	1	0	0	19,997%
2016	7	6	1	0	0	19,997%
2017	7	5	2	0	0	19,995%

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel diatas 3.7 pada tahun 2014 ada 6 akun, sangat efisiensi ada 5 akun dan di efisiensinya ada 1 akun, maka presentasi tahun 2014 yaitu sebesar 19,997%. Pada tahun 2015 jumlah akunnya terdiri 7 akun, sangat efisiensi ada 6 akun dan di efisiensinya ada 1 akun, maka presentasinya yaitu 19,997%. Adapun ditahun 2016 jumlah akunnya juga ada 7 akun, sangat efisiensi ada 6 akun dan efisiensi ada 1 maka presentasinya tahun 2016 yaitu sebesar 19,997%. Begitu juga tahun 2017 jumlah akunnya ada 7 akun, sangat efisiensinya ada 6 akun, dan efisiensi ada 1 akun, maka presentasinya pada tahun 2017 yaitu sebesar 19,995%.

$$3. \text{ Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 3.8
Nilai Interpretasi Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Presentasi Efisiensi
Efektivitas	>100%
Cukup Efektivitas	85% hingga 100%
Kurang Efektivitas	65% hingga 84%
Tidak Efektivitas	<65%

Sumber: Mahmudi, 2011

Berikut ini adalah cara perhitungan kinerja efektivitas Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2017.

Tabel 3.9
Nilai Kinerja Efektivitas Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Akun	Efektivitas	Cukup Efektivitas	Kurang Efektivitas	Tidak Efektivitas	Presentasi Efektivitas
2014	6	0	4	2	0	50,924%
2015	7	0	4	2	1	56,859%
2016	7	0	1	2	4	41,431%
2017	7	0	7	0	0	67,706%

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 3.9 jumlah akun pada tahun 2014 ada 6 akun sedangkan ditahun 2015-2017 ada 7 akun. Tahun 2014 terdapat cukup efektivitas ada 3, kurang efektivitas ada 2 akun, dan tidak efektivitas ada 1 akun, maka presentasinya yaitu sebesar 41,766%. Pada tahun 2015 terdapat cukup efektivitas 4 akun, kurang efektivitas ada 2 akun dan tidak efektivitas terdapat 1 akun, maka presentasinya yaitu 56,859%. Adapun tahun 2016 terdapat pada cukup efektivitas ada 1 akun,

kurang efektivitas ada 2 akun, dan tidak efektivitas ada 4 akun maka presentasinya yaitu 41,431%. Sedangkan ditahun 2017 terdapat cukup efektivitas ada 7 akun dan presentasinya yaitu sebesar 67,706%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hasil evaluasi belanja operasional pada Sekretariat DPRD kabupaten banyuasin tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa perselisihan belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 19,74% jika dibandingkan tahun 2014. belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 8,18% jika dibandingkan dengan tahun 2014. belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 20,98% jika dibandingkan dengan tahun 2014. belanja modal mengalami penurunan sebesar 28,52% jika dibandingkan tahun 2015. belanja peralatan dan mesin juga mengalami penurunan yaitu sebesar 34,63% jika dibandingkan tahun 2015. belanja bangunan dan gedung mengalami kenaikan sebesar 0,12% dibandingkan tahun 2014.

Perhitungan selisih pada tahun 2015-2016 pada belanja operasi mengalami penurunan sebesar 5,86% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 1,73% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Belanja barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 6,12%. belanja pada modal yaitu sebesar 30,33% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016. belanja

peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 33,58%, jika dibandingkan dengan tahun 2016. Belanja bangunan dan gedung juga mengalami penurunan sebesar 29,68% dibandingkan dengan tahun 2016.

Perhitungan selisih antara tahun 2016-2017 pada belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 13,35% dibandingkan dengan tahun 2016. Belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 4,77% jika dibandingkan dengan tahun 2016. belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 14,34% dibandingkan dengan tahun 2016. Belanja modal mengalami kenaikan sebesar 62,28% dibandingkan dengan tahun 2016. Belanja peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 68,99% dibandingkan dengan tahun 2016. belanja bangunan dan gedung sebesar 33,55% dibandingkan dengan tahun 2016.

Hasil perhitungan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada tahun 2014-2017. Perhitungan pada rasio ekonomi pada tahun 2014 ada 6 akun yaitu sebesar 72,176%. Ditahun 2015 ekonominya ada 7 akun yaitu sebesar 88,321%. ditahun 2016 ekonominya ada 7 akun yaitu sebesar 150,164%. ditahun 2017 ada 6 akun yaitu sebesar 63,078%. Perhitungan pada rasio efisiensi pada tahun 2014 ada 6 akun, sangat efisiensi ada 5 akun dan di efisiensinya ada 1 akun yaitu sebesar

19,997%. tahun 2015 jumlah akunnya terdiri 7 akun, sangat efisiensi ada 6 akun dan di efisiensinya ada 1 akun, yaitu sebesar 19,997%. ditahun 2016 jumlah akunnya juga ada 7 akun, sangat efisiensi ada 6 dan efisiensi ada 1 yaitu sebesar 19,997%. tahun 2017 jumlah akunnya ada 7 akun, sangat efisiensinya ada 6 akun, dan efisiensi ada 1 akun, yaitu sebesar 19,995%. Perhitungan rasio efektivitas Tahun 2014 terdapat cukup efektivitas ada 3, kurang efektivitas ada 2, dan tidak efektivitas ada 1, yaitu sebesar 41,766%. tahun 2015 terdapat cukup efektivitas 4, kurang efektivitas ada 2 akun dan tidak efektivitas terdapat 1 akun, yaitu 56,859%. Sedangkan ditahun 2017 terdapat cukup efektivitas ada 7 akun yaitu sebesar 67,706%.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang ada maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pada Sekretariat DPRD kabupaten banyuasin dalam perhitungan kinerja keuangan harus diteliti lagi biar realisasinya bisa mendekati anggaran. Adapun berapa persen angka kelebihan atau kekurangan dari perbandingan antara anggaran dan realisasi yang masih terbilang wajar.

Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti kinerja keuangan anggaran

belanja secara lebih rinci terhadap laporan realisasi anggaran (LRA).

sehingga akan selalu ada perubahan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Munandar A.5 2011. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Sekaran. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi Revisi 4*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Penerbit Alfabeta

Peraturan Perundangan :

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Realisasi Anggaran Berbasis Kas.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.*